

# **PENGUATAN PERAN DEWAN PERS DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN KORBAN *DOXING* DI MEDIA SIBER**

**Nadya Ariska Humaira**

## **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi membawa tantangan lain berupa lahirnya salah satu kejahatan siber atau *cyber crime* yaitu tindak kejahatan penggalian, pengungkapan, dan penyebaran data pribadi atau informasi pribadi tanpa izin atau dapat disebut sebagai *doxing*. Pers adalah pilar keempat demokrasi yang penting bagi kelancaran pelaksanaan demokrasi dan kebebasan pers. Insan atau masyarakat pers terutama wartawan acapkali dijadikan sasaran dari tindak kejahatan penggalian, pengungkapan, dan penyebaran data pribadi tanpa izin atau *doxing* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dalam hal memberikan payung perlindungan kepada wartawan dalam menghadapi *doxing* dan menjadi korban *doxing*, peran dewan pers sangat diperlukan selaku lembaga yang diberikan fungsi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta wawancara, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji dan menelaah substansi dan bahan penelitian yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pers perlu menguatkan perannya dengan mengesahkan Surat Keputusan terkait Standar Perlindungan Profesi Wartawan, serta upaya lainnya dalam penelitian ini. Selanjutnya, perlu adanya kesadaran dari wartawan jika menjadi korban *doxing* untuk mengadukan dan menanganinya bersama dewan pers, kesadaran wartawan bagi yang belum patuh untuk mengikuti ketentuan Kode Etik Jurnalistik, dan terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum Indonesia untuk menjadikan perusahaannya menjadi badan hukum Indonesia supaya dewan pers dapat melindungi wartawan korban *doxing* dengan maksimal.

Kata kunci: *Doxing*, Peran Dewan Pers, Perlindungan Wartawan

***Enhancing The Authority Of The Press Council In Safeguarding Journalists  
Affected By Doxing In The Cyber Media***

**Nadya Ariska Humaira**

**ABSTRACT**

*The progress of technology presents a new difficulty in the emergence of a cybercrime known as doxing, which involves the unauthorised extraction, disclosure, and dissemination of personal data or information. The press serves as the fourth pillar of democracy, playing a crucial role in ensuring the effective functioning of democracy and safeguarding press freedom. The press council plays a crucial role in safeguarding journalists from doxing and external entities targeting them. The press council, established by Law Number 40 of 1999 concerning The Press, protects press freedom by preventing interference from external entities. This study employs normative juridical research methodologies, utilising data gathering techniques such as literature reviews and interviews. The obtained results will be subjected to qualitative analysis, involving a thorough assessment and examination of the acquired research materials and their underlying substance. The findings indicate that the press council should enhance its influence by enacting a decree pertaining to the Standards for the Protection of Journalist Professionals, in addition to other measures outlined in this study. Moreover, journalists should be cognizant of the need to report incidents of doxing and address them through the press council. It is also important for journalists to adhere to the provisions outlined in the Journalistic Code of Ethics. Additionally, press companies that are not recognised as Indonesian legal entities should take steps to establish themselves as such, enabling the press council to provide optimal protection for journalists who fall victim to doxing.*

*Keywords: Doxing, Role of Press, Safeguarding Journalist*